



# LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TAHUN  
**2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 merupakan salah satu pertanggungjawaban formal Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2021 tidak dapat direalisasikan dengan baik dikarenakan anggaran dan masa pandemi covid 19.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Komunikasi dan Informatika juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika, unit kerja dan seluruh stakeholder.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan DISKOMINFO pada masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2021  
Kepala,



Herman Tohi, S.E, M.E  
NIP. 19780420 200212 1 005

## Ringkasan eksekutif

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja dalam tahun 2021 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi dari Kepala Daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahunan 2021 terdapat 4 (empat) sasaran dengan 6 indikator keberhasilan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78,00
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73
	Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	20,00
Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	23,26

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 5 Program yang terdiri dari 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.717.871.989,00 dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ....	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pernyataan Visi .....	9
2.2 Pernyataan Misi.....	9
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	10
2.5 Indikator Kinerja Utama .....	12
2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>15</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.2 Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>26</b>

**Lampiran**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan /atau APBN pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

*Good governance* merupakan persyaratan bagi setiap instansi Pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja yang *akuntabel*, oleh karena itu perlu penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang standar dengan tepat, jelas dan terukur yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan Tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang di peroleh selama tahun 2021.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika

- dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

### 1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem Informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.

Seiring dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah dan *good governance*, maka institusi teknis bidang Komunikasi dan Informatika di pandang penting untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, pada bulan Januari tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai OPD baru yang dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya merupakan perkembangan teknologi informasi dalam menciptakan pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang pada pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan TIK karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan TIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk pembangunan system digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kemampuan peningkatan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyiapan portal pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Terintegrasinya berbagai system pelayanan baik masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;
4. Perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK;
5. Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah tersedia.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## Tugas

Secara umum Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas teknis sebagai berikut :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
2. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pelaksanaan Layanan Infrastruktur e-Government
4. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika

Secara spesifik tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat berdasarkan urusan yang terbagi menjadi bidang tugas, sebagai berikut :

### 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di kabupaten, layanan infrastruktur dasar data center, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.

### 2. Bidang Layanan e - government

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layanan Manajemen Data Informasi e-government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

### **Fungsi**

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten.
3. Penyelenggara layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.
4. Penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan informatika.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

### Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 18 orang pegawai yang terdiri atas 11 orang pejabat struktural, 7 orang fungsional pelaksana, dan dibantu oleh 25 orang Pegawai Honorer Tidak Tetap yang terdiri dari 4 Orang Tenaga Teknisi E-Gov, 3 orang Programmer, 14 Orang Tenaga Administrasi/Operator Komputer, 2 Orang Petugas Kebersihan serta 2 Orang Penjaga Kantor.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tingkat Pendidikan Pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Jumlah PNS dan CPNS Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan tingkat pendidikan  
Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SMA	0	3	3	17
4	D3	0	2	2	11
5	SI	0	9	9	50
6	S2	0	4	4	22
JUMLAH		0	18	18	100

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menunjang didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, karena masih kurangnya jumlah personil fungsional pelaksana dalam melaksanakan bidang komunikasi dan informatika, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SD sebesar 0 %, SMP sebesar 0 %, SMA sebesar 17%, D3 sebesar 11%, S1 sebesar 50% dan S2 sebesar 22%.

Berikut jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

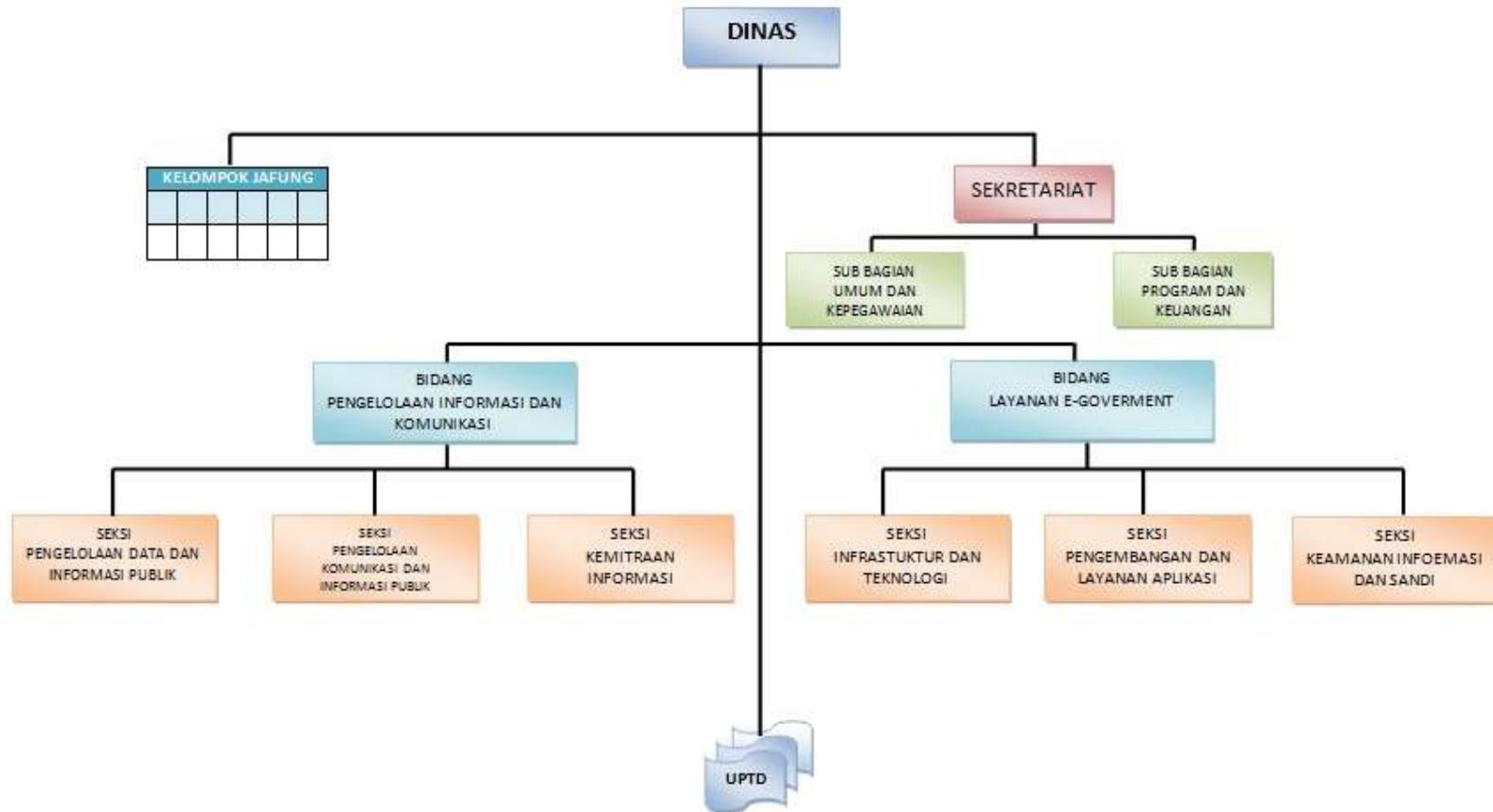
**Tabel 1.2**  
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2021

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	0	3	3	17
3	Golongan III	0	12	12	67
4	Golongan IV	0	3	3	17
JUMLAH		0	18	18	100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 17%, golongan III sebanyak 67%, golongan IV sebanyak 17%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 6 Tahun 2016



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selain hal-hal tersebut, dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2021.

### 2.1 Pernyataan Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tetap tentu harus mengacu kepada visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat).**

### 2.2 Pernyataan Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung misi ke-1, ke - 3 dan ke – 4. Adapun 3 misi tersebut yakni sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis

### 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya

Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur, Meningkatnya Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan, Meningkatnya Agrowisata dan Wisata Bahari, Menyediakan data dan Informasi digital potensi investasi daerah, Menyediakan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik dan Meningkatnya PAD. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi
3. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral
4. Peningkatan Keamanan Informasi
5. Penyediaan Sistem Informasi Aplikasi yang mendukung informasi lapangan pekerjaan , Promosi dan Pemasaran Daerah
6. Peningkatan Retribusi Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### **2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program Dinas Komunikasi dan Informatika mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya
    - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator
    - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang
    - 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
    - 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
    - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator
    - 1.1 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - 1.2 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3. Program Aplikasi Informatika dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - 1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 2.5 Indikator Kinerja Utama

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Instansi
2. Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah
3. Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah
4. Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan
5. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Target Indikator Kinerja Utama masing-masing sasaran terhadap Indikator Kinerja yang direncanakan pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	81,00	84,00	88,30	90,00	93,00
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	81,40	88,37	90,70	95,35	100,00
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73	81,82	90,91	95,45	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00	56,25	62,50	68,75	75,00	81,25
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	27,91	32,56	37,21	41,86	46,51

## 2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja dalam pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Perjanjian Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	<b>I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.099.710.090</b>
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	37.498.000
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.581.854.249
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.200.000
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.711.841
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.500.000,00
			6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.500.000
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.446.000
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	<b>II Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>169.422.199</b>
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73	<b>III Program Aplikasi Informatika</b>	<b>1.361.633.100</b>
			8 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	169.422.199
			9 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.361.633.100
Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang Di Informasikan	50,00	<b>II Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>79.565.500</b>
			10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	79.565.500
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	<b>II Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan</b>	<b>7.541.100</b>
			11 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.541.100

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Timur tahun 2021 yang telah di tandatangani antara Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen ini.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dengan pengukuran kinerja ini maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan pengukuran kinerja digunakan :

- a. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran.
- b. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri atas ;
  - Indikator Input ( Masukan)
  - Indikator output (Keluaran)
  - Indikator outcome (hasil)

##### 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangung Jabung Timur.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78	78,62	101%
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	100%
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73	77,27	106%
	Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	20,00	20,00	100%
Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00	56,25	113%
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	9,3	40%

**Tabel 3.2**  
Perbandingan Realiasi Kinerja  
Dinas komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
		2020	2021	
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78,62	-
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	100%
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73	77,27	106%
	Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	NA	20,00	-
Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50	56,25	113%
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	NA	9,3	-

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Realiasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD  
Dinas komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN REALISASI S.D 2021	%
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	93	78,62	84,54
Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	100	74,42	74,42
	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	100	77,27	77,27
Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	81,25	56,25	69,23
Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	46,51	9,3	20,00

### 3.1.2 Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.4**

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

**Tabel 3.5**

Analisa Capaian Sasaran Strategi 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pelayanan Instansi	78	78,62	101%

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk indeks Pelayanan Instansi berada di kriteria sangat baik. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja yang kurang optimal sehingga mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun upaya yang dilakukan Dinas komunikasi dan informatika antara lain pengajuan usulan penambahan anggaran untuk pembangunan kantor dan perlengkapan kerja.

## 2. Peningkatan akses layanan teknologi informasi dan komunikasi

**Tabel 3.6**

Analisa Capaian Sasaran Strategi 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	100%
Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73	77,27	106%
Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	20,00	20,00	100%

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk 3 Indikator diatas berada di kriteria sangat baik. Pada tahun 2021 indikator informasi publik yang di publikasikan perangkat daerah telah sesuai dengan target dari capaian sasaran yakni 74,42% dengan jumlah perangkat daerah yang telah mempublikasikan informasi publik sebanyak 32 perangkat daerah melalui website masing-masing organisasi perangkat daerah. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam pengoptimalan Standar Pelayanan Informasi Publik di OPD dan Website OPD yang tidak terupdate. Adapun upaya yang dilakukan antara lain penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik di OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi.

Capaian kinerja pada indikator aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah pada tahun 2021 telah melebihi target capaian yakni sebesar 106%. Jumlah aplikasi yang menggunakan jaringan intra sebanyak

17 aplikasi. Adapun faktor pendorong pencapaian yakni perangkat daerah telah memanfaatkan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibantu oleh tenaga programmer.

Pelayanan publik berbasis TIK merupakan indikator yang tidak termasuk di dalam target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator ini merupakan salah satu sasaran peningkatan akses layanan teknologi informasi dan komunikasi pada dokumen RESTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk Indikator pelayanan publik berbasis TIK berada di kriteria sangat baik. Dengan realisasi 20% capaian indikator telah mencapai 100% berarti sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun aplikasi pelayanan publik yang dibangun yakni aplikasi SIPATEN yang peruntukannya digunakan pihak kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya aplikasi ini belum dapat diakses dikarenakan belum dilakukan pengujian Keamanan (*security*).

### 3. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral

**Tabel 3.7**

Analisa Capaian Sasaran Strategi 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50,00	56,25	113%

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk Indikator data statistik sektoral organisasi perangkat daerah yang diinformasikan berada di kriteria sangat baik. Dimana dokumen yang dapat di susun bersama tim BPS yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Publikasi Sakernas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam penyusunan dokumen statistik daerah yang disusun oleh tim dari BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun kendala yang

dihadapi yakni masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dokumen statistik. Sehingga penyusunan dokumen statistik daerah pada tahun berikutnya akan ditiadakan sampai menunggu kesiapan dari tim BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 4. Peningkatan Keamanan Informasi

**Tabel 3.8**

Analisa Capaian sasaran Strategi 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	9,3	40%

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk Indikator perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah berada di kriteria sangat rendah.

Hambatan dan kendala untuk indikator kinerja perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingginya target sasaran strategi peningkatan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2) Kurang optimalnya perangkat daerah dalam memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam pelayanan informasi publik pemerintah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan untuk peningkatan keamanan informasi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan evaluasi target sasaran strategi peningkatan keamanan informasi dengan tim perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 2) Melakukan sosialisasi dan peningkatan wawasan tentang pentingnya penggunaan layanan persandiaan untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi public

### 3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Target pendapatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 285.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 292.377.800,00.

**Tabel 3.9**

Realisasi Pendapatan  
Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	285.000.000	292.377.800	102,59
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	285.000.000	292.377.800	102,59

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 4.717.871.989,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.543.371.989,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 174.500.000,00. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan pandemi covid 19 maka Pendidikan dan pelatihan pegawai dilaksanakan secara daring. Adapun realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 4.510.366.716,00 (95,60%) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4.336.216.716,00 (95,44%) dan belanja modal sebesar Rp. 174.150.000,00 (99,50%). Penjabaran program dan kegiatan pagu serta realisasi Tahun Anggaran 2021 di sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis  
Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	<b>I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.099.710.090</b>	<b>2.988.363.644</b>	<b>96,41</b>
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.498.000	24.032.000	64,09
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.141.000	2.094.000	66,67
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.293.000	8.803.000	71,61
		1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.064.000	13.135.000	59,53
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.581.854.249	2.523.368.726	97,73
		2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.574.249	1.840.708.726	97,78
		2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	699.280.000	682.660.000	97,62
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.200.000	28.200.000	87,58
		3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	28.200.000	28.200.000	100,00
		3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	0	0,00
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.711.841	101.413.068	89,18
		4.1 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.240.000	7.521.350	81,40
		4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.698.447	46.652.400	99,90
		4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	16.812.394	16.369.350	97,36
		4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	4.800.000	4.200.000	87,50
		4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	4.080.000	4.080.000	100,00
		4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.081.000	22.589.968	70,42
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.500.000,00	90.275.000	99,75
		5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.500.000	90.275.000	99,75

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.500.000	90.045.550	85,35
		6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	2.300.000	100,00
		6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.200.000	87.745.550	85,02
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.446.000	131.029.300	94,64
		7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	96.420.000	95.686.500	99,24
		7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.590.000	26.937.400	80,19
		7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.436.000	8.405.400	99,64
2	Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	<b>II PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>169.422.199</b>	<b>120.951.060</b>	<b>71,39</b>
		8 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	169.422.199	120.951.060	71,39
		8.1 Pelayanan Informasi Publik	24.381.000	13.217.360	54,21
		8.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	145.041.199	107.733.700	74,28
		<b>III PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1.361.633.100</b>	<b>1.328.966.549</b>	<b>97,60</b>
		9 Pengelolaan e - government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.361.633.100	1.328.966.549	97,60
		9.1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.338.125.300	1.310.671.374	97,95
		9.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	23.507.800	18.295.175	77,83
3	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	<b>IV PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>79.565.500</b>	<b>66.510.500</b>	<b>83,59</b>
		10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	79.565.500	66.510.500	83,59
		10.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79.565.500	66.510.500	83,59
4	Peningkatan Keamanan Informasi	<b>V PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>7.541.100</b>	<b>5.574.963</b>	<b>73,93</b>
		11 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.541.100	5.574.963	73,93
		11.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.541.100	5.574.963	73,93

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 95,60%, hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sangat baik.

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No.7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja pelaksanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan sehingga Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan dapat menjadi kenyataan.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa pada tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performing Government*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2021.

Sebagai akhir kata, kami selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajaran mengharapkan agar LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Secara spesifik, bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, LKjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERMAN TONI, S.E, M.E**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, S.E**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**H. ROMI HARIYANTO, S.E**

Muara Sabak, November 2021

Pihak Pertama,

**HERMAN TONI, S.E, M.E**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	78
2	Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42%
		Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	72,73%
3	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50%
4	Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26%

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 4.717.871.989,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.543.371.989,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 174.500.000,00

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.099.710.090,00	APBD II
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	169.422.199,00	APBD II
3.	Aplikasi Informatika	1.361.633.100,00	APBD II
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	79.565.500,00	APBD II
5.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.541.100,00	APBD II
<b>Jumlah</b>		<b>4.717.871.989,00</b>	

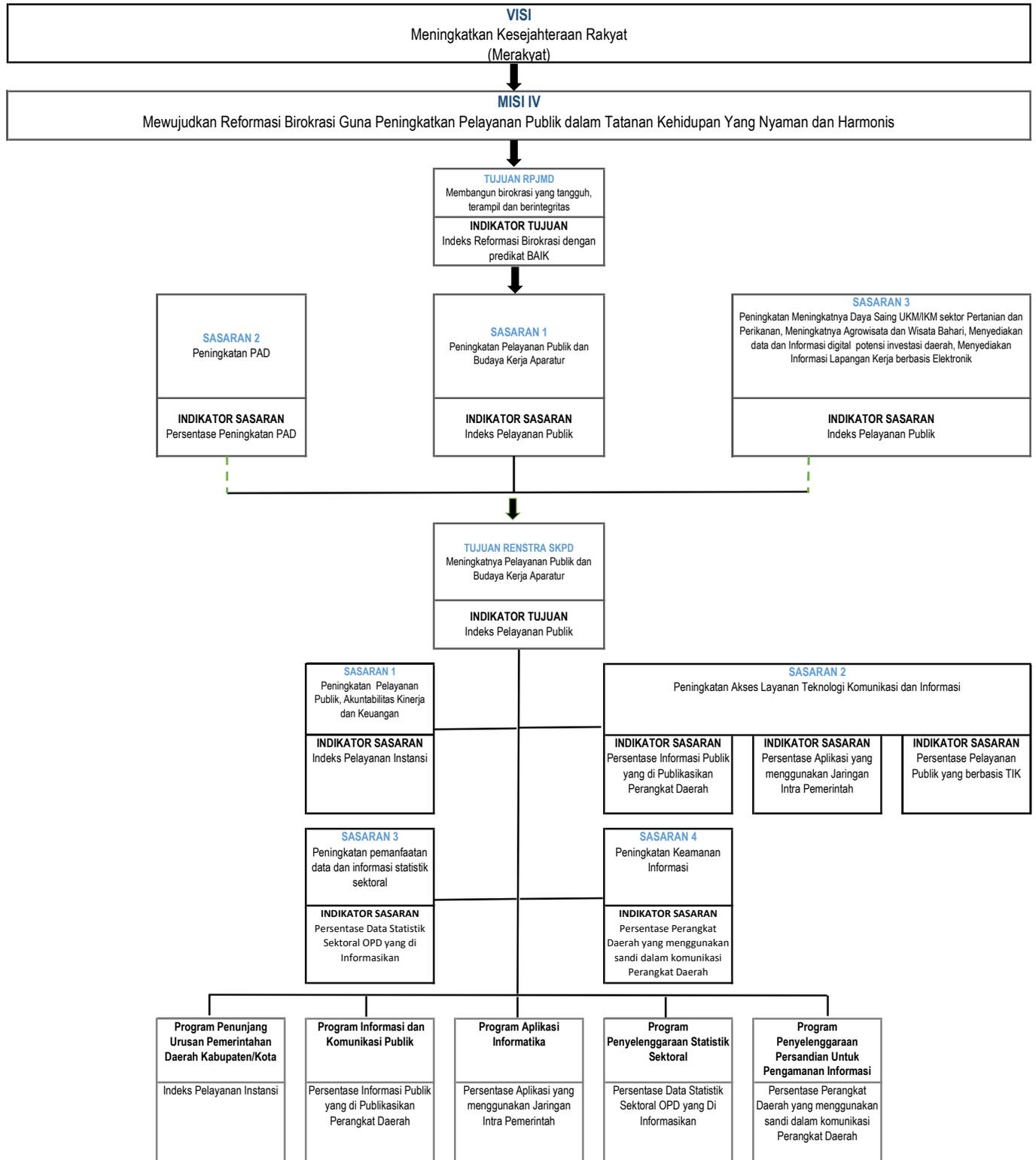
Bupati Tanjung Jabung Timur

**H. ROMI HARIYANTO, S.E**

Muara Sabak, November 2021  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

**HERMAN TONI, S.E, M.E**

**CASCADING KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Catt.  
 : sasaran pendukung misi 1 dan misi 3

## Perhitungan Capaian Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) \times 100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Indeks Pelayanan Instansi</b>	<b>78,00</b>	<b>78,62</b>	<b>100,79</b>
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	79,37%	79,37
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi	7 Dokumen	5 Dokumen	71,43
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50%	50,00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44 stel	44 stel	100,00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1 Orang	0	0,00
1.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100%	100%	100,00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9 Jenis	9 Jenis	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	7 Unit	7 Unit	100,00
1.6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	230 Lembar	230 Lembar	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	100,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	22 Unit	22 Unit	100,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6 = (5/4) x 100
2	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah</b>	74,42	74,42	100,00
		<b>Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK</b>	20	20	100,00
2.1	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	28 OPD	28 OPD	100,00
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00
2.1.2	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Jumlah KIM Desa/Kel yang di bina - Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi - Jumlah Pendapatan (juta)	12 Desa/Kel 83 Menara Rp.285 juta	14 Desa/Kel 87 Menara Rp.292,3 juta	108,00
3	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah</b>	72,73	77,27	106,25
3.1	PENGLOLAAN E - GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH	Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi	100	100	100,00
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (OPD)	1 OPD	1 OPD	100,00
3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun (Aplikasi)	16 Aplikasi	17 Aplikasi	106,00
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan</b>	50,00	56,25	112,50
4.1	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH	Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral	16 OPD	18 OPD	113,00
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6 Dokumen	5 Dokumen	83,00
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>	23,26	9,3	39,98
5.1	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)	10 OPD	4 OPD	40,00
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00